

**Desain Instruksional Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Berdasarkan Isu Aktual Bidang Ketahanan Nasional Sesuai Karakteristik Peserta
Didik**

Sri Haryati

Email: sriharyati52@staff.uns.ac.id

Wijianto

Email: wijianto@staff.uns.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mengembangkan desain instruksional mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan model ADDIE berdasarkan isu aktual bidang ketahanan nasional sesuai karakteristik peserta didik. Metode yang digunakan berupa studi pengembangan dengan model ADDIE. Hasil pengembangan berupa desain instruksional atau perencanaan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada salah satu kompetensi dasar. Kesimpulan yang dapat disampaikan, perencanaan pembelajaran yang berorientasi isu aktual sesuai karakteristik peserta didik dapat dijadikan dasar bagi guru dalam merencanakan pembelajaran yang inovatif.

PENDAHULUAN

Hakikat pendidikan merupakan usaha mempersiapkan generasi penerus bangsa melalui proses bimbingan, pengajaran, latihan dan evaluasi. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia serta keterampilan yang diperuntukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Adapun untuk mewujudkan maksud dari arti pendidikan tersebut, perlu sinergi peran yang proporsional antara pembuat kebijakan, sekolah, guru, dan siswa.

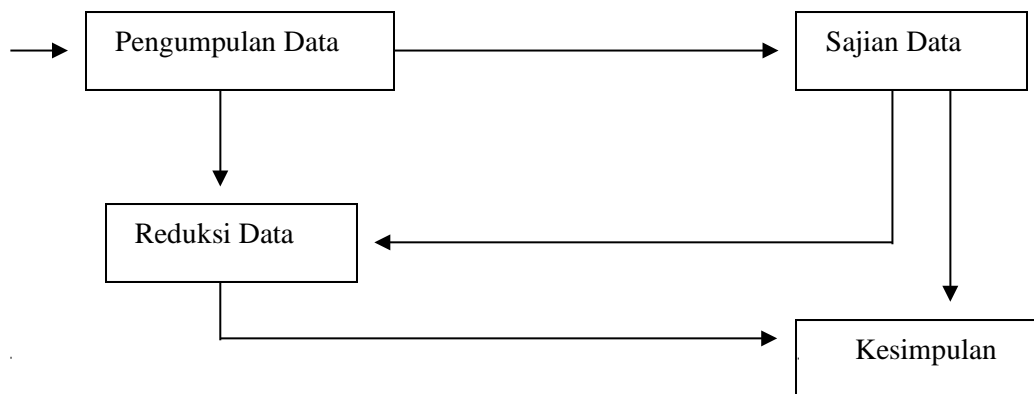
Dalam tulisan ini, akan dominan dibahas mengenai peran guru, karena bagaimanapun, dalam pembahasan dunia pendidikan, peran guru dapat dikatakan sangat sentral dan dapat mempengaruhi sebuah proses pembelajaran di lapangan. Guru sebagai pendidik wajib memiliki berbagai macam kompetensi seorang pendidik. Dalam dinamikanya, guru sebagai pendidik selalu berusaha untuk menyesuaikan diri dengan berbagai macam perubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan, salah satunya ialah perubahan kurikulum. Salah satu bentuk penyesuaian terhadap perubahan kurikulum ialah pengembangan indikator pencapaian kompetensi. Guru ialah seseorang yang berwenang dan bertanggung jawab atas pendidikan siswa, baik pendidikan di lingkungan sekolah, maupun di luar sekolah (Djamarah, 2010: 32). Perubahan kurikulum berdampak pada setiap jenjang pendidikan sekolah, termasuk di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Pembelajaran di SMK memiliki keunikan sendiri karena SMK memiliki ciri khas yang mengarah pada suatu praktik lapangan. Hal tersebut akan berdampak pada setiap proses pembelajaran termasuk bagaimana standar evaluasi pembelajaran yang digunakan. Namun begitu, perlu pengembangan yang tepat dan sesuai sasaran terkait dengan proses pengembangan indikator pencapaian kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan di SMK, salah satunya penyusunan indikator capaian pembelajaran yang bersumber dari pemetaan kompetensi dasar pada setiap level pembelajaran. Disadari atau tidak, adanya perubahan kurikulum telah berdampak secara “sistemik” dalam proses kegiatan belajar mengajar, baik pada penyusunan rencana atau pembuatan RPP, termasuk pemetaan indikator maupun pada saat praktik. Fenomena perkembangan Kurikulum 2013 yang seharusnya menjadi solusi berbagai macam permasalahan pendidikan, kenyataannya belum dapat menyelesaikan berbagai macam permasalahan pendidikan yang terjadi selama ini. Kuntarti (2014) menegaskan bahwa perubahan kurikulum berdampak pada pencapaian kualitas sumber daya manusia. Perubahan pada kurikulum akan berdampak pada perubahan

sistem dan proses pembelajaran, yang kemudian akan bersinggungan dengan kegiatan belajar mengajar di kelas. Hal ini menegaskan bahwa kajian tentang isi kurikulum merupakan hal yang penting dan mendasar dalam sistem pendidikan dan pembelajaran. Selanjutnya, Suwignyo dan Yuliantri (2018) memaparkan bahwa praktik belajar kewargaan dalam kehidupan sehari-hari merupakan suatu bentuk ketahanan sosial masyarakat yang dapat terus dikembangkan dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Adapun praktik kewarganegaraan merupakan salah satu proses pembelajaran yang dipelajari dan diimplementasikan dalam pembelajaran PPKn yang dikenal dengan *project citizen*.

Kegiatan proses belajar mengajar yang seharusnya sudah *student centered learning*, masih terkendala proses pembelajaran yang belum sepenuhnya dikuasai oleh guru dalam konsep *student centered learning* dimana guru seharusnya menjadi fasilitator, bukan sebagai person yang mendominasi di kelas. Pada PPKn persekolahan, permasalahan yang muncul salah satunya adalah masalah pengembangan indikator pencapaian kompetensi tertentu yang perlu dikaji ulang agar sesuai dengan tujuan dari pendidikan kewarganegaraan pada umumnya. Permasalahan tersebut erat kaitannya dengan permasalahan evaluasi atau penialain pembelajaran. Adapun evaluasi atau penialain hasil belajar itu sendiri ialah suatu proses sistematis dan menyeluruh dalam setiap tahap pengumpulan data informasi guna penilaian pencapaian pembelajaran siswa (Arifin, 2009: 10). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pemetan kendala pengembangan indikator pencapaian kompetensi, khususnya pada kompetensi kajian ketahanan nasional pada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan persekolahan di jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

METODE

Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi, studi dokumen, dan diskusi kelompok terarah. Analisis data menggunakan analisis interaktif yang mencakup reduksi data, sajian data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan dan dilakukan secara terus menerus dari sejak pengumpulan data hingga verifikasi sejak awal sampai saat selesai serta selalu menguji antar komponen secara terus menerus sehingga kesimpulan yang di dapat bisa teruji dengan selektif dan akurat (Moleong, 2010).



Gambar 1: Model Analisis Interaktif HB
(Sumber: Miles & Huberman, 1992)

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, guru-guru mata pelajaran PPKn SMK menjelaskan bahwa terdapat berbagai macam kendala dalam proses pengembangan indikator capaian kompetensi baik secara umum pada proses pembelajaran PPKn maupun secara khusus pada pengembangan indikator pencapaian kompetensi kajian ketahanan nasional.

Secara umum, kendala yang dialami guru dalam pengembangan indikator pencapaian kompetensi pada mata pelajaran PPKn yaitu mulai dari aspek persiapan pembelajaran terutama pada proses penyusunan instrumen penilaian hasil belajar berupa kesulitan guru dalam penjabaran kompetensi dasar ke dalam indikator, kesulitan guru dalam membuat kisi-kisi instrumen penilaian dan juga kesulitan guru dalam membuat butir-butir instrumen penilaian. Guru juga mengakui mendapati kesulitan dalam menentukan jenis penilaian yang tepat sesuai materi dalam kompetensi dasar, dan guru juga mengalami kesulitan dalam menerapkan teknik penilaian yang sudah direncanakan. Tahapan persiapan ini penting karena akan sangat menentukan bagaimana proses inti pembelajaran nantinya berlangsung. Guru perlu menguasai materi kompetensi dasar yang sedang diajarkan guna merumuskan alat evaluasi yang paling sesuai dan cocok dalam pembelajaran.

Selanjutnya, pengembangan indikator pencapaian kompetensi kajian ketahanan nasional berkaitan dengan kesulitan guru terletak pada pemetaan jenjang kognitif yang tidak tepat menyangkut hasil belajar yang akan dicapai, penyesuaian dengan karakteristik peserta didik yang belum bisa diakomodir dalam indikator pencapaian kompetensi, kesulitan dalam menentukan keluasan dan kedalaman indikator pencapaian kompetensi terkait materi yang akan dikembangkan. Hal ini dikarenakan guru perlu memetakan kajian ketahanan nasional sesuai dengan komponen utama pendidikan kewarganegaraan. Adapun komponen utama dari

Pendidikan Kewarganegaraan setidaknya meliputi 3 (tiga) hal, yaitu *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic dispositions* (Branson, 1998) *Civic knowledge* berkaitan dengan isi atau apa yang seharusnya warganegara ketahui. *Civic skills* merupakan ketrampilan apa yang seharusnya dimiliki oleh warganegara yang mencakup; ketrampilan intelektual dan ketrampilan partisipasi. Sedangkan *civic dispositions* berkaitan dengan karakter privat dan publik dari warganegara yang perlu dipelihara dan ditingkatkan dalam demokrasi konstitusional. Dalam hal ini, guru masih dihadapkan pada sulitnya proses pemetaan kajian ketahanan nasional ke dalam tiga komponen pendidikan kewarganegaraan berupa *civic knowledge*, *civic skill*, dan *civic disposition*.

Terkait dengan permasalahan proses evaluasi atau penilaian, hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nuroktya Ningsih (2012: 131) yang memaparkan bahwa beberapa hal berkaitan dengan hambatan guru dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran PKn, yaitu hambatan dalam penyusunan instrumen penilaian hasil belajar, hambatan dalam menelaah instrumen penilaian adalah dalam ujicoba instrumen penilaian. Dalam hal mekanisme penilaian hasil belajar, guru PKn mengalami hambatan dalam penilaian akhir pembelajaran (*post test*), yaitu ketersediaan waktu yang digunakan untuk melakukan penilaian yang dianggap kurang sehingga menyebabkan guru menjadi tidak maksimal dalam melakukan proses evaluasi pembelajaran. Dengan demikian hasil penelitian tersebut mempertegas bahwa dalam prosesnya, masih terdapat berbagai macam kendala atau hambatan guru dalam melakukan pengembangan indikator pencapaian kompetensi pada proses pembelajaran PKn pada umumnya dan pada kompetensi kajian ketahanan nasional pada khususnya.

KESIMPULAN

Secara umum, disimpulkan bahwa kendala guru dalam proses pembelajaran PPKn di SMK yaitu adanya kesulitan guru dalam proses penyusunan instrumen penilaian hasil belajar berupa kesulitan guru dalam penjabaran kompetensi dasar ke dalam indikator, kesulitan guru dalam membuat kisi-kisi instrumen penilaian dan juga kesulitan guru dalam membuat butir-butir instrumen penilaian. Guru juga mengakui mendapati kesulitan dalam menentukan jenis penilaian yang tepat sesuai materi dalam kompetensi dasar, dan guru juga mengalami kesulitan dalam menerapkan teknik penilaian yang sudah direncanakan. Selanjutnya, kendala guru dalam pengembangan indikator pencapaian kompetensi ketahanan nasional yaitu pemetaan jenjang kognitif yang tidak tepat menyangkut hasil belajar yang akan dicapai, penyesuaian dengan karakteristik peserta didik yang belum bisa diakomodir dalam indikator

pencapaian kompetensi, kesulitan dalam menentukan keluasan dan kedalaman indikator pencapaian kompetensi terkait materi yang akan dikembangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zaenal. (2009). *Evaluasi Pembelajaran*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Branson, S Margaret. (1998). “*The Role of Civic Education, A Forthcoming Education Policy*” Task Force Position Paper from the CommunitarianNetwork.
- Djamarah, Syaiful Bahri. (2010). *Guru dan Anak didik dalam Interaksi Edukatif*. Jakarta: Rineka Cipta
- Kuntarti, R., 2014, ‘Implikasi Perubahan Kurikulum Pendidikan Pada Sistem Pendidikan Taruna Terhadap Pencapaian Kualitas Taruna Guna Mendukung Ketahanan Satuan (Studi Di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah)’. *Jurnal Ketahanan Nasional*. Vol. 20 No. 1, April 2014, hh. 39-46.
- Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman, (1992), “*Qualitative Data Analysis*”, Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi, Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru, Cetakan I, Jakarta: UI Press.
- Moleong, L.J. (2010). *Metode Penelitian Kualitaitaf*. Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya.
- Ningsih, Nuroktya. (2012). *Hambatan Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran di SMAN 1 Sanden*. *Jurnal Citizenship*, Vol. 1 No. 2, Januari 2012
- Suwignyo, A Dan Yuliantri, R, D, A., (2018), ‘Praktik Kewargaan Sehari-Hari Sebagai Ketahanan Sosial Masyarakat Tahun 1950-An (Sebuah Tinjauan Sejarah), *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 24, No.1, April 2018, hh. 94 - 116.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional